

Temuan ketidakpatuhan terhadap studi pemeriksaan keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya

RA Evy Cintya Febriany^{1*}, Kartika Hendra Ts², Agni Astungkara³

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik, Surakarta.

*Email: evyfebriany@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara umur pemda, opini audit tahun sebelumnya, belanja modal daerah, jumlah skpd, pendapatan asli daerah dengan temuan ketidakpatuhan. Studi empiris dari penelitian ini adalah 30 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menerbitkan LKPD lengkap tahun 2016-2020 dan sudah diaudit BPK-RI dan hasil tersebut tersedia dalam database LHP BPK-RI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya, jumlah skpd, dan pendapatan asli daerah berpengaruh pada jumlah temuan ketidakpatuhan. Sedangkan umur pemda dan belanja modal daerah tidak berpengaruh pada temuan ketidakpatuhan.

Kata Kunci: Umur pemda; opini audit tahun sebelumnya; belanja modal daerah; jumlah skpd; pad; temuan ketidakpatuhan

Findings of non-compliance with the regional financial audit study and the factors that influence it

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the age of the local government, the audit opinion of the previous year, the regional capital expenditure, the number of SKPD, the local revenue to the non-compliance. This research is an empirical study of 30 district or city governments in Central Java which publish complete LKPD in 2016-2020 and have been audited by BPK-RI, and the results of the audit are available in the BPK-RI LHP database. The results of this study indicate that the previous year's audit opinion, number of regional work units, and local revenue have an effect on the number of non-compliance findings. While the age of the local government and regional capital expenditures have no effect on the number of non-compliance findings.

Keywords: *Age of local government; audit opinion of the previous year; regional capital expenditure; number of regional work units; local revenue; non-compliance finding*

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, awal dimulainya otonomi daerah. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, maka setiap daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dampak dari adanya otonomi ini membuat pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengurus pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka menjadikan pengelolaan keuangan pemda dalam otonom daerah menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dituntut untuk bisa Lebih akuntabel, transparan dan mandiri dalam mengelola keuangannya sendiri.

Transparansi dan akuntabel pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk kewajiban pengelolaan keuangan dalam Laporan keuangan seperti yang tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) diharuskan menyusun Laporan pertanggung jawaban berupa Laporan keuangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD dan harus diserahkan kepada auditor pemerintah untuk dilakukan audit atau pemeriksaan independen.

PP No. 71 Tahun 2010, menyatakan bahwa Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran Lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai lokasi sumber daya. Sedangkan tujuan Laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang ada.

Laporan keuangan yang telah disusun oleh pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UU No 15 Tahun 2004. Pemeriksaan yang dilakukan BPK ini berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No 1 Tahun 2007. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini diharapkan BPK mampu memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah. Salah satu indikator penentu pengelolaan keuangan yang baik adalah opini yang diberikan BPK. Menurut UU No 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan keuangan berdasarkan empat kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern (UU Nomor 15 Tahun 2004).

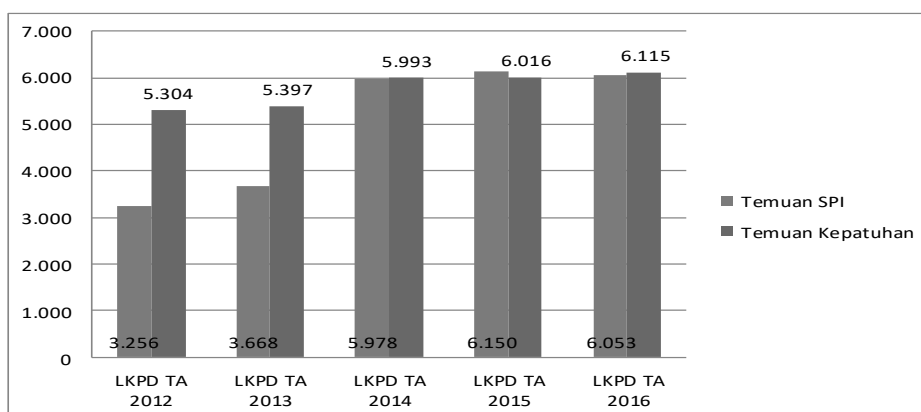
Tabel 1. Opini LKPD tahun 2012 s.d 2016

	WTP	WDP	TMP	TW
Tahun				
2012	23%	62%	14%	1%
2013	30%	59%	9%	2%
2014	47%	46%	6%	1%
2015	58%	36%	5%	1%
2016	70%	26%	4%	0%

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2016. Hal ini berbanding terbalik dengan opini WDP yang mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2012 hingga 2016. Opini TMP juga mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016.

Pemeriksaan keuangan oleh BPK juga memberikan catatan hasil temuan pemeriksaan dan tidak hanya menghasilkan opini semata. Hasil dari pemeriksaan menerangkan tentang kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan pemerintah terhadap aturan undang-undang yang berlaku.

Berikut ini riwayat hasil temuan pemeriksaan SPI dan ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan pada LKPD tahun anggaran 2012-2016.



Gambar 1. Hasil temuan pemeriksaan SPI

Gambar 1 diatas menunjukkan bahwa selama Lima tahun terakhir, temuan atas pemeriksaan LKPD mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, temuan berjumlah 8.560 kasus dan meningkat menjadi 9065 kasus pada tahun 2013. Dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 12168 kasus pada tahun 2016. Peningkatan jumlah temuan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pula penurunan dalam pengelolaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (2017) menyebutkan bahwa masalah lain berkaitan dengan temuan BPK RI adalah kelemahan dalam pengelolaan, sehingga terjadi kekurangan atau keterlambatan penerimaan daerah yang menyebabkan banyaknya dana penerimaan yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara tepat waktu dan juga membuka peluang penyalahgunaan.

Dengan adanya ketidaksesuaian antara opini WTP yang semakin membaik dengan semakin banyaknya jumlah kasus temuan pemeriksaan yang terjadi di pemerintah daerah, maka memotivasi peneliti melakukan penelitian mengenai faktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap jumlah temuan BPK atas LKPD di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah dengan kaitannya terhadap jumlah temuan audit masih terbatas. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Johnson, Iowensohn, Reck, dan Davies (2012) yang membuktikan bahwa *ML comments* berhubungan dengan karakteristik *auditee* dan *audit tenure*, namun tidak berhubungan dengan pengalaman auditor.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ardriansyah (2014), Purusotomo (2014), Harosbiyanto (2015), dan Rahayu (2016). Ardriansyah (2014) menemukan bahwa ukuran daerah mempunyai pengaruh positif dengan nilai temuan kerugian daerah, sedangkan opini tahun sebelumnya dan anggaran pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap nilai temuan kerugian daerah. Lebih lanjut, Purusotomo (2014) menyatakan bahwa jumlah SKPD memiliki hubungan negatif secara signifikan terhadap temuan SPI dan kepatuhan.

Harosbiyanto (2015) yang meneliti 347 pemerintah kota atau kabupaten pada tahun 2012 menemukan bahwa opini Laporan keuangan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap jumlah kasus temuan pemeriksaan. Rahayu (2016) menunjukkan bahwa diferensiasi fungsional, belanja modal, dan tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap jumlah temuan BPK-RI. Sementara ukuran pemerintah daerah, opini audit tahun sebelumnya, peringkat pemerintah daerah, kecakapan profesional, dan gender berpengaruh negatif terhadap jumlah temuan BPK-RI.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten atau kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2019. Sementara desain sampel yang digunakan adalah sampel non probabilitas dimana dalam pengambilan sampel melalui metode ini, besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling adalah cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti dan umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria khusus sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang mempublikasikan LKPD secara Lengkap tahun 2015-2019 dan telah diaudit oleh BPK-RI, serta hasil audit tersebut ada dalam database LHP BPK-RI; dan

Pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menyajikan seluruh data dan informasi terkait umur pemda, opini audit tahun sebelumnya, belanja modal daerah, jumlah SKPD, dan PAD yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel serta analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 5 (Lima) variabel independen terhadap 1 (satu) variabel dependen, dengan menggunakan aplikasi SPSS Versi 17.0 for windows sebagai alat regresi model yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model regresi bebas dari gejala-gejala asumsi klasik. Hal ini adalah untuk memastikan bahwa hasil penelitian valid

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini meliputi 2 tahapan, yaitu uji kualitas data (uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik) dan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi berganda.

Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan deskripsi umum mengenai data dan penyebaran data yang digunakan dalam penelitian ini, yang dapat dilihat dari mean, maximum, minimum, dan standar deviasi untuk menggambarkan penyebaran data penelitian. Deskripsi data penelitian tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil uji statistic descriptive
Descriptive statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
AGE	143	47,00	66,00	63,4266	,26453
OPINI	143	1,00	5,00	3,4336	,06844
BMD	143	227,99	894,53	513,9687	9,79689
SKPD	143	25,00	173,00	60,8671	1,61323
PAD	143	78,51	520,86	213,5679	7,38917
FINDING	143	7,00	32,00	17,5105	,47397
Valid N (listwise)	143				

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 143. Berdasarkan tabel tersebut variabel AGE memiliki nilai minimum 47,00 dan maksimum 66,00 dengan nilai mean 63,43 yang berarti usia administratif pemda sebagai objek dalam penelitian ini rata-rata telah berdiri kurang Lebih selama 63 tahun. Standar deviasi yang menunjukkan variasi sebaran data di sekitar nilai mean sebesar 0,26. Penyebaran data Age adalah 3,16.

Variabel OPINI memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 1 dan 5. Nilai mean sebesar 3,43 menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai objek penelitian ini kebanyakan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu dengan jumlah 103 atau 72%. Standar deviasi menunjukkan sebaran data disekitar nilai mean sebesar 0,07 dan penyebaran data untuk variabel opini sebesar 0,82.

Variabel BMD memiliki nilai minimum 227,99 dan maksimum 894,53 serta nilai mean 513,97 menunjukkan bahwa belanja modal daerah rata-rata berkisar 514.000.000 rupiah. Standar deviasi menunjukkan sebaran data di sekitar nilai mean sebesar 9,79 dan penyebaran data variabel bmd adalah 117,15.

Variabel SKPD memiliki nilai minimum adalah 25 dan nilai minimum adalah 173 serta nilai mean sebesar 60,86 yang berarti sebagian besar pemerintah daerah yang menjadi objek penelitian ini rata-rata memiliki jumlah SKPD 61. Standar deviasi menunjukkan sebaran data di sekitar nilai mean 1,61 dan sebaran data dalam variabel SKPD adalah 19,29.

Variabel PAD memiliki nilai minimum, maksimum dan mean sebesar 78,51; 520,86 dan 213,56 yang berarti besar nilai rata-rata PAD adalah 213.567.000 rupiah. Standar deviasi menunjukkan sebaran data disekitar nilai mean dan variabel PAD sebesar 7,38 dan 88,36.

Variabel FINDING memiliki nilai minimum 7 dan maksimum 32 dengan nilai mean 17,51 menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah temuan pada sampel penelitian adalah 18 temuan. Standar deviasi menunjukkan sebaran data disekitar nilai mean dan variabel FINDING sebesar 0,47 dan 5,66.

Uji asumsi klasik

Model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat estimasi secara signifikan dan representatif bahwa data yang digunakan tidak menyimpang dari asumsi klasik dasar regresi. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini meliputi :

Uji normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji one-sample Kolmogorov-smirnov dengan nilai residu atas persamaan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Asumsi normalitas terpenuhi jika nilai signifikansi yang dihasilkan Lebih dari 5%. Hasil pengujiannya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		143
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,25710192
	Absolute	,064
Most Extreme Differences	Positive	,064
	Negative	-,040
Kolmogorov-Smirnov Z		,762
Asymp. Sig. (2-tailed)		,606

Hasil uji normalitas data di atas menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal dan dibuktikan dengan nilai asymp. Sig atas semua nilai residu data dalam penelitian sebesar 0,606 atau Lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Karena data penelitian terdistribusi secara normal, maka dapat digunakan untuk pengujian dengan model regresi berganda.

Uji autokorelasi

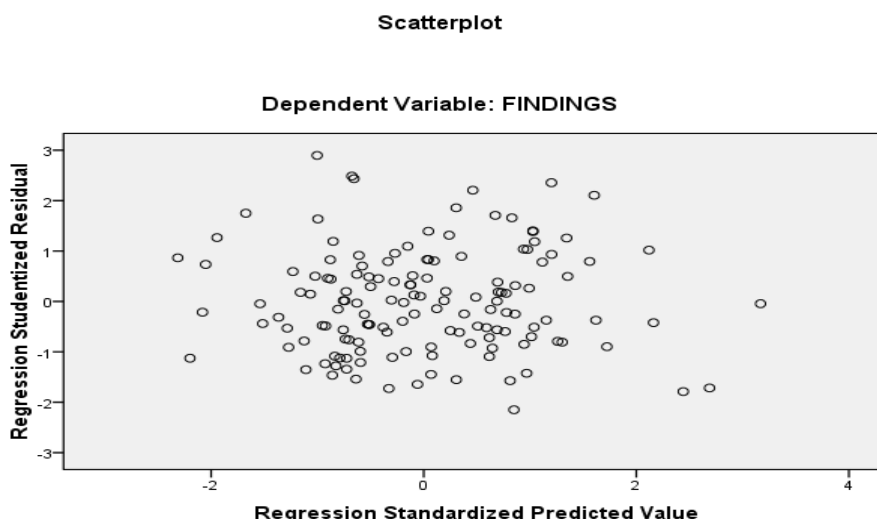
Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar residual pada periode t dengan t-1. Penelitian ini menggunakan alat uji run tests untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Hasil uji autokorelasi

Runs test		Unstandardized Residual
Test Value ^a		-,22411
Cases < Test Value		71
Cases >= Test Value		72
Total Cases		143
Number of Runs		63
Z		-1,594
Asymp. Sig. (2-tailed)		,111

Hasil uji Autokorelasi tersebut menunjukkan bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,111 . Hasil pengujian ini Lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadi signifikan terhadap tingkat signifikansi 0,05 dan disimpulkan bahwa residual tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Uji heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varian pada nilai residual untuk seluruh pengamatan atas variabel independen. Hasil pengujian heteroskedastisitas (scatterplot) disajikan pada tabel berikut.

Berdasarkan output scatterplots tersebut diketahui bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebarannya tidak membentuk pola. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan metode Tolerance Value dan Variance Inflating Factor (VIF). Kriteria yang ditetapkan adalah jika Tolerance Value > 0,10 dan VIF < 10 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	36,194	9,500		3,810	,000			
1	AGE	-,233	,148	-,130	-1,574	,118	,919	1,089
	OPINI	-1,238	,597	-,179	-2,072	,040	,844	1,185
	BMD	,001	,004	,013	,169	,866	,988	1,012
	SKPD	,050	,025	,169	2,015	,046	,895	1,118
	PAD	-,014	,005	-,219	-2,568	,011	,866	1,155

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa Tolerance Value dan VIF untuk seluruh variabel independen masing-masing yaitu Lebih dari 0,10 dan kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas.

Regresi linear berganda

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh Umur Pemda (AGE), Opini Audit Tahun Sebelumnya (OPINI), Belanja Modal Daerah (BMD), Jumlah SKPD (SKPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Jumlah Temuan Ketidapatuhan (FINDING).

Model regresi

Model regresi digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini Lebih dari satu. Model persamaan regresi Linear berganda adalah :

$$\text{FINDING} = \alpha + \beta\text{Age} + \beta\text{Opini} + \beta\text{Bmd} + \beta\text{SKPD} + \beta\text{PAD} + e$$

Keterangan:

FINDING	= Jumlah Temuan Ketidapatuhan
Age	= Umur Pemda
Opini	= Opini Audit Tahun Sebelumnya
Bmd	= Belanja Modal Daerah
SKPD	= Jumlah SKPD
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$	= Koefisien Regresi
e	= Standar errors

Dapat ditunjukkan hasil rangkuman analisis regresi Linear berganda seperti pada tabel berikut :

Tabel 6. Analisis regresi linear berganda

Variabel	B	Sig.
Constant	36,194	,000
AGE	-,233	,118
OPINI	-1,238	,040
BMD	,001	,866
SKPD	,050	,046
PAD	-,014	,011

Hasil pengujian analisis regresi Linear berganda dapat dijelaskan melalui persamaan berikut :

$$\text{FINDING} = 36,194 - 0,233 - 1,238 + 0,001 + 0,050 - 0,014$$

Nilai konstanta sebesar 36.194 yang menyatakan bahwa apabila semua variabel bebas Age (X1), Opini (X2), Bmd (X3), Skpd (X4), Pad (X5) bernilai 0, maka Temuan Ketidapatuhan (Y) sebesar 36.194;

Variabel Age (X1) memiliki nilai koefisien regresi ke arah negatif sebesar -0.233. Tanda negatif tersebut berarti bahwa semakin meningkatnya umur pemda maka akan menurunkan temuan ketidapatuhan;

Variabel opini (X2) memiliki nilai koefisien regresi ke arah negatif sebesar -1.238. Tanda negatif tersebut berarti bahwa semakin meningkatnya Opini audit tahun sebelumnya maka akan menurunkan Temuan Ketidapatuhan;

Variabel Bmd (X3) memiliki nilai koefisien regresi ke arah positif sebesar 0.001. hal tersebut berarti bahwa semakin meningkatnya Belanja Modal Daerah maka akan meningkatkan temuan ketidapatuhan;

Variabel Skpd (X4) memiliki nilai koefisien regresi ke arah positif sebesar 0.050. hal tersebut berarti bahwa semakin meningkatnya jumlah SKPD maka akan meningkatkan temuan ketidapatuhan; dan

Variabel Pad (X5) memiliki nilai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0.014. Tanda negatif tersebut berarti bahwa semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan menurunkan Temuan Ketidapatuhan.

Uji kelayakan model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menentukan good of fittest atau uji kelayakan model regresi dalam menganalisis hipotesis penelitian. Kriteria pengujian menggunakan probability value (sig.), yaitu jika

sig. Kurang dari 0,05 maka hal itu berarti model tersebut Layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi dalam penelitian, begitu juga sebaliknya.

Tabel 7. Hasil uji f
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	637,263	5	127,453	4,449	.001 ^a
1 Residual	3924,471	137	28,646		
Total	4561,734	142			

Hasil uji signifikansi F diatas menunjukkan bahwa probability value dari model regresi yang digunakan dalam penelitian Lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05; yaitu sebesar 0,001. Selain itu nilai F hitung 4,449 Lebih besar dari nilai F-Tabel 2,44. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini Layak digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis dan juga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis (Uji t)

Uji Signifikansi t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji t juga digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel sehingga dapat ditentukan arah pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Kriteria pengambilan keputusan atas hasil pengujian adalah dengan melihat probability value (sig.) kurang dari 0,05 atau 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat diterima, begitu juga sebaliknya. Hasil uji signifikansi t ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil uji hipotesis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error				
(Constant)	36,194	9,500		3,810	,000	
AGE	-,233	,148	-,130	-1,574	,118	Ditolak
1 OPINI	-1,238	,597	-,179	-2,072	,040	Diterima
BMD	,001	,004	,013	,169	,866	Ditolak
SKPD	,050	,025	,169	2,015	,046	Diterima
PAD	-,014	,005	-,219	-2,568	,011	Diterima

Hasil diatas mengindikasikan bahwa variabel independen OPINI, SKPD dan PAD berpengaruh pada jumlah temuan ketidakpatuhan. Hal ini terbukti dengan nilai probabilitas variabel penelitian OPINI, SKPD dan PAD memiliki nilai signifikansi sebesar 0,040; 0,46 dan 0,011 Lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitiannya. Sedangkan untuk variabel AGE dan BMD tidak memiliki pengaruh pada jumlah temuan ketidakpatuhan. Dengan melihat nilai probabilitas variabel AGE dan BMD masing-masing 0,118 dan 0,866 Lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian. Berarti hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Opini Audit Tahun Sebelumnya, Jumlah SKPD dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap jumlah temuan ketidakpatuhan. Sedangkan untuk Umur Pemda dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap jumlah temuan ketidakpatuhan.

Tanda koefisien regresi positif masing masing 0,01 untuk BMD dan 0,50 untuk SKPD. Sementara koefisien regresi negatif masing-masing sebesar -0,233 untuk AGE, -1,238 untuk OPINI dan -0,014 untuk PAD. Tanda positif pada koefisien regresi variabel BMD dan SKPD yang diperoleh dalam pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa semakin besar Belanja Modal yang dimiliki oleh pemda dan semakin banyak SKPD yang dimiliki oleh pemda, maka jumlah temuan ketidakpatuhan yang dihasilkan oleh BPK akan semakin tinggi. Sedangkan tanda negatif pada koefisien regresi variabel AGE, OPINI dan PAD mengindikasikan bahwa semakin Lama umur pemerintah daerah, semakin baik opini yang diperoleh (WTP) pemerintah daerah, dan semakin banyak Pendapatan yang diperoleh pemda, maka jumlah temuan ketidakpatuhan yang dihasilkan BPK akan semakin sedikit.

Uji koefisien determinasi

Koefisien Determinasi menyatakan presentase total variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian. model regresi dengan 1 variabel independen, koefisien determinasi ditunjukkan oleh R Square (R^2), sedangkan model regresi dengan 2 atau Lebih variabel independen, koefisien determinasi ditunjukkan oleh Adj R^2 . Penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square karena terdapat 5 variabel independen dalam model penelitian. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.374 ^a	.140	.108	5,35217

Hasil uji koefisien determinasi tersebut menghasilkan Adjusted R Square sebesar 0,108 (10,8%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel FINDING (Jumlah Temuan) mampu dijelaskan oleh variabel independen berupa AGE, OPINI, BMD, SKPD, dan PAD sebesar 10,8% dan sisanya sebesar 89,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh umur pemda terhadap temuan ketidakpatuhan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa umur pemda (age) tidak berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan (FINDING). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari *doyle et al (2007)* yang menyatakan bahwa umur pemda memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan *Sodanian et al (2013)* yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara umur entitas dengan kelemahan pengendalian internal. Hal tersebut menunjukkan semakin Lama suatu pemerintah daerah berdiri, tidak dapat menjamin bahwa sistem pengendalian internal dan tingkat kepatuhannya Lebih baik daripada pemda yang baru berdiri.

Pengaruh opini audit tahun sebelumnya terhadap temuan ketidakpatuhan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya (opini) berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan (FINDING), hasil penelitian ini sejalan penelitian *Johnson et al (2012)*, *Hapsari et al (2013)*, dan *Wijaya (2015)* telah berhasil membuktikan bahwa opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah temuan ketidakpatuhan. Hal tersebut menunjukkan semakin baik opini diterima (WTP), semakin sedikit pula jumlah temuan ketidakpatuhan pada periode selanjutnya. Perolehan tersebut menandakan bahwa pelaporan keuangan pemda memiliki kualitas yang bagus, dan telah sesuai SAP, cukup pengungkapannya, sesuai dengan undang-undangan yang berlaku dan telah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, hal tersebut dapat dibuktikan dari sedikitnya jumlah temuan pemeriksaan yang dihasilkan.

Pengaruh belanja modal daerah terhadap temuan ketidakpatuhan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa belanja modal daerah (BMD) tidak berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan (FINDING), dengan kata lain BMD berpengaruh negatif terhadap FINDING (Jumlah temuan) tidak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah temuan yang dihasilkan BPK-RI tidak dipengaruhi oleh Belanja Modal Daerah. Hasil tersebut tidak konsisten dengan *Ardyansah (2014)* yang menyatakan bahwa bahwa semakin besar belanja daerah yang dinilai dari semakin besarnya total realisasi anggaran belanja modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap besarnya nilai temuan audit dalam pemeriksaan Laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh jumlah SKPD terhadap temuan ketidakpatuhan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa jumlah SKPD (skpd) berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan (FINDING). Hasil ini konsisten dengan *setyaningrum (2012)* yang menyatakan bahwa sistem pemerintah yang Lebih kompleks terjadi pada pemerintah daerah dengan jumlah SKPD yang banyak dan kompleksitas ini membuat potensi pencatatan yang tidak akurat. *Doyle et al (2007)* juga menyatakan bahwa kompleksitas entitas terhubung positif dengan meningkatnya kelemahan pengendalian intern. Pemda dengan jumlah skpd yang banyak cenderung memiliki kesulitan implementasi SPI, terutama masalah pelaporan keuangan, hingga

memungkinkan dihasilkannya temuan pemeriksaan yang Lebih tinggi. Hal tersebut berarti semakin kompleks suatu entitas dalam menjalankan aktivitas dan memiliki area kerja yang tersebar, sehingga semakin sulit pengendalian internal yang dijalanannya.

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap jumlah temuan ketidakpatuhan

Hasil pengujian seperti tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan (FINDING). Dengan kata lain PAD berpengaruh negatif terhadap finding (jumlah temuan) diterima. Hal tersebut berarti bahwa semakin banyak PAD yang diterima akan mengurangi jumlah temuan pemeriksaan pada tahun berikutnya.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis Umur Pemda, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Belanja Modal Daerah, Jumlah SKPD, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Temuan Ketidakpatuhan. Penelitian ini menggunakan sampel 143 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempublikasikan LKPD secara Lengkap tahun 2015-2019 dan telah diaudit oleh BPK-RI.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa (1) umur pemda tidak berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan, karena umur pemerintah daerah yang Lebih Lama tidak menjamin akan didapatkan jumlah temuan ketidakpatuhan yang Lebih sedikit. (2) opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan, hal ini berarti opini tahun sebelumnya sangat mempengaruhi temuan ketidakpatuhan yang didapatkan auditor BPK dalam pemeriksaan tahun berikutnya. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WDP, TW maupun disclaimer, maka pemerintah daerah berusaha menunjukkan upaya perbaikan sehingga temuan ketidakpatuhan pada tahun berikutnya dapat diperkecil. (3) belanja modal daerah tidak berpengaruh terhadap jumlah temuan ketidakpatuhan. hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah, maka semakin banyak temuan ketidakpatuhan yang didapatkan auditor BPK. Hasil ini berarti nilai temuan yang didapatkan auditor BPK dipengaruhi oleh besarnya jumlah anggaran yang didapat pemerintah daerah. (4) jumlah SKPD berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan. Dari hasil tersebut berarti diferensiasi fungsional mempengaruhi jumlah temuan dalam Laporan keuangan. Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam membangun daerah. Semakin banyak jumlah SKPD maka semakin banyak informasi yang harus diungkapkan sebagai upaya mengurangi asimetri informasi dan menunjukkan kinerja yang semakin baik. (5) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap temuan ketidakpatuhan, dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki pendapatan Lebih besar memiliki kecenderungan akan didapatkan temuan ketidakpatuhan yang Lebih banyak. Permasalahan pengelolaan pendapatan daerah juga merupakan salah satu penghambat pemerintah daerah dalam mencapai opini yang Lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS edisi 5*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit SaLemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: SaLemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U, dan Bougie, R. 2013. *Research Methods for Busines : A Skill Building Approach Sixth Edition*. John Wiley & Sons
- Suhardjanto dan Yulianingtyas. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan WAjib dalam Laporan Keuangan Pemerinah Daerah (studi empiris di kabupaten/kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 8(1) : 30- 42
- Sumarjo, H. 2010. *Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda*. Skripsi, FakuItas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

-
-
- Setyaningrum, Dyah. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI*. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012
- Wijaya, Wiji. 2015. *Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Temuan Ketidaktepatan Terhadap Ketentuan Perundang Undangan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah)*. Tesis. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Wolk, et al (2001). "Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice". *Accounting and Business Research*. Vol. 18. No 69:47-56.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester. Semester I & II Tahun 2012- 2017*. <http://www.bpk.go.id>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
- Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- UUD 1945 Pasal 23G Ayat 1 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah